

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Perkembangan suatu bangsa khususnya pembangunan ekonomi sebagai titik beratnya harus mengacu pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembangunan bangsa yang menuju perekonomian yang mapan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan perekonomian yang didukung oleh adanya kegiatan investasi untuk keperluan pembangunan itu sendiri dan dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana yang hanya dapat tercipta melalui proses - proses transformasi berbagai sumberdaya, modal lahan, tenaga kerja serta perangkat peraturan yang mendukung.

Kegiatan investasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menciptakan sarana dan prasarana dalam pembangunan sehingga pemerintah selalu berusaha menarik pengusaha asing guna menanamkan modalnya agar ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan investasi. Kegiatan investasi tersebut, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah (BUMN), koperasi maupun swasta akan memberi berbagai keuntungan, seperti memberi lapangan kerja, pemanfaatan sumberdaya manusia dan sebagainya. Menyadari bahwa pembangunan nasional membutuhkan pembiayaan yang sangat besar dan agar tercapainya sarana yang telah ditetapkan harus dibarengi dengan kerja keras untuk memperoleh sumber pembiayaan

Salah satu sumber yang penting dalam hal pendanaan dan permodalan adalah pinjaman uang atau dukungan investor dari luar daerah dan bahkan dari luar negeri. Pemupukan modal melalui tabungan masyarakat di daerah selama ini dapat dikatakan belum cukup berhasil. Di samping karena kendala yang bersifat sosio ekonomis, karena pendapatan masyarakat yang relatif rendah, pada umumnya masyarakat di daerah-daerah, terutama di lingkungan pedesaan masih meghadapi kendala budaya yang belum mendorong meningkatnya *'bank-minded'* untuk menunjang kegiatan ekonomi sehari hari.

Terjalannya kerjasama antara pemerintah Kabupaten Sleman dengan Pemerintah Jepang, membuka pintu investasi secara langsung. Melalui peran pemerintah Jepang yang mengirimkan para pengusaha pengusaha dari Jepang untuk melihat lihat berbagai potensi di Kabupaten Sleman yang prospektif, didukung dengan kondisi geografis wilayah Kabupaten Sleman yang sangat menjanjikan untuk dunia usaha. Serta tanggapnya dari pemerintah Kabupaten Sleman itu sendiri yang berusaha meningkatkan layanan bagi calon investor antara lain melalui: peningkatan pelayanan perijinan, peningkatan kepastian hukum dalam berusaha maupun peningkatan informasi prospek investasi yang ada di Kabupaten Sleman agar dapat

## **B. Tujuan Penulisan**

Penulisan skripsi ini bertujuan :

- a. Untuk memecahkan masalah dengan teori yang relevan.
- b. Untuk membuktikan hipotesa dengan data dan fakta.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001 pemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan tentang otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah tersebut tercakup dan diatur dalam dua undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Guna mendukung kedua undang-undang tersebut, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan pemerintah tambahan untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan tentang otonomi daerah. Dalam konteks ini, sedikitnya terdapat tiga buah peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan sejauh ini.

Kedua undang-undang tersebut secara pokok memberikan sebuah kebebasan bertindak seluas-luasnya kepada daerah namun tetap dalam kerangka otonomi daerah yang bertanggung jawab untuk melakukan pengaturan dan pemerintahan atas wilayahnya secara mandiri tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat daerah tersebut sesuai dengan kondisi dan potensi daerahnya masing-masing. Keberadaan kedua undang-undang tersebut

dapat dipandang sebagai dampak positif dari proses reformasi yang bergulir sejak terjadinya krisis ekonomi yang menandai adanya perubahan paradigma, yaitu perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi.

Tujuan utama dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 adalah untuk meletakkan dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah melalui pemberian keleluasaan kebebasan bertindak kepada daerah untuk dapat menjadi sebuah daerah yang otonom dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan otonomi daerah secara luas didasarkan pada prinsip demokrasi, tanggung jawab, partisipasi masyarakat, kesetaraan dan keadilan serta pertimbangan atas potensi dan diversifikasi daerah.

Sementara, tujuan utama Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 adalah untuk secara efektif meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, untuk menciptakan sebuah sistem keuangan daerah yang adil dan realisasi sistem perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Di masa mendatang konsep pembangunan akan menggunakan paradigma yang berbeda dan lebih bersifat desentralistik, berorientasi upaya strategis menuju pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang No. 22 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 menekankan sistem perencanaan yang lebih desentralistik dengan penekanan perencanaan dari bawah ke atas. Pengelolaan pembangunan juga ditekankan untuk dilakukan secara transparan, bertanggung jawab dan melibatkan semua pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Partisipasi masyarakat dalam

pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah dan birokrasi senantiasa diminta untuk dapat bersikap terbuka, bertanggung jawab dan keterlibatan mereka dalam proses pembuatan keputusan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota akan memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan identifikasi, perencanaan dan evaluasi pembangunan di daerah mereka. Dengan demikian, pemerintah kabupaten dan pemerintahan kota harus siap menyiapkan program pembangunannya secara konseptual dan operasional. Menyadari kedudukan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota sebagai basis pembangunan negara berdaulat, hal demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan otonomi daerah akan banyak tergantung pada seberapa jauh partisipasi pemerintah daerah dan pemerintah kota dalam kegiatan pembangunan di wilayah mereka. Itu berarti bahwa masyarakat kabupaten dan kota tersebut harus diberikan kepercayaan dan kewenangan yang cukup untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi dan sumber daya setempat.

Kabupaten Sleman merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dengan luas 574,82 km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas DIY dengan populasi 874.250 jiwa. Sleman merupakan wilayah yang ideal untuk menampung perkembangan Kota Yogyakarta.

Kabupaten Sleman memiliki hampir semua yang dibutuhkan dunia usaha untuk investasi. Keamanan yang cukup baik, masyarakat yang ramah, sumber daya manusia (SDM) yang relatif berkualitas, lokasi strategis, dan infrastuktur serta

kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta).

Banyak potensi daerah di kabupaten Sleman yang sebenarnya memiliki prospek untuk menjadi peluang investasi asing yang menjanjikan. Namun, terbatasnya modal, sarana dan prasarana pendukung menjadikan potensi daerah tersebut terbengkalai. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah dengan titik berat pada kabupaten / kota, sesuai Undang-undang Nomor. 22 tahun 1999 maka Pemerintah Kabupaten / kota diharapkan segera mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu kewenangan yang harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah adalah masalah investasi asing dengan segala bentuk permasalahannya. Pembangunan investasi tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh pemerintah daerah saja, akan tetapi pemerintah daerah juga harus memosisikan diri sebagai fasilitator yang mendorong dan mengendalikan tumbuh kembangnya investasi agar investasi yang berkembang dapat berdampak positif terhadap pembangunan Sleman serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Sedangkan Jepang yang merupakan negara maju dalam bidang teknologi dan sumber daya manusianya, sejak tahun 2001 menjalin kerjasama dengan Kabupaten Sleman dalam bidang pengembangan potensi daerah di Sleman agar di kemudian hari

menjadi peluang investasi asing bertaraf internasional. Potensi yang dikelola secara benar akan menghasilkan perkembangan investasi yang menggembirakan. Berdasarkan karakteristik wilayah, potensi Kabupaten Sleman dapat digolongkan menjadi 3 kompetensi dasar : pendidikan, pariwisata dan jasa/perdagangan yang ketiganya bertumpu pada sumber daya manusia (SDM).

Jepang sangat berperan aktif dalam pengembangan potensi potensi di Sleman yang dulunya belum bisa dimanfaatkan, namun sekarang banyak potensi di Sleman yang sangat menjanjikan untuk dunia usaha dan investasi.

Dalam upaya membangun investasi yang optimal pemerintah kabupaten Sleman menempuh ke berbagai cara secara komprehensif dari optimalisasi peran dan fungsi kelembagan bidang investasi maupun peningkatan sarana prasarana dalam rangka memberikan layanan kepada pihak asing agar mempunyai ketertarikan menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Sleman, khususnya para penanam modal dari Jepang.

Banyaknya pilihan potensi memberikan berbagai macam pilihan dalam mengembangkan usaha untuk pengolahan potensi yang menjanjikan di Kabupaten Sleman.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu pokok permasalahan sebagai berikut: **"Bagaimana peran pemerintah Jepang dalam pengembangan potensi daerah di Kabupaten Sleman?"**

## **E. Kerangka Dasar Pemikiran**

Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang akan terjadi. Teori dalam hal ini digunakan sebagai kerangka dasar analisa dalam menjelaskan suatu fenomena itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kejadian itu di masa datang.<sup>2</sup>

Untuk itu guna menjelaskan pokok permasalahan dalam penulisan ini maka penulis mengacu pada Teori "Peran" dalam hal ini teori yang dikemukakan oleh *Robert Linton*, memandang bahwa, perilaku itu harus dipahami dalam konteks sosialnya. Kita tidak akan pernah bisa menjelaskan fenomena politik kalau kita hanya melihat individu terlepas dari konteks sosialnya. Perilaku para aktor selalu dibatasi oleh lingkungannya. Peranan (role) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang diletakkan pada suatu posisi. Setiap orang atau aktor yang menduduki posisi itu, diharapkan akan berperilaku sesuai dengan posisi itu.

Teori peranan menegaskan bahwa "perilaku politik... adalah perilaku dalam menjelaskan peranan politik".<sup>3</sup> Sedangkan menurut *Jack C. Plano*, yang dimaksud dengan peran dalam Kamus Analisa Politik diartikan sebagai perilaku yang diharapkan akan dilakukan seseorang yang menduduki posisi tertentu. Teori ini

---

<sup>2</sup> Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, LP3ES; Jakarta, 1990; hal. 49



berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah sebagai akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik.

Seperti tersirat dalam uraian diatas, teori peranan berasumsi bahwa aktor politik menemukan dirinya dalam berbagai posisi, mulai dari presiden, menteri luar negeri, anggota DPR, warga biasa bahkan aktor Negara sekalipun yang masing-masing posisi itu memiliki pola perilaku tersendiri. Seorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu. Harapan atau dugaan (expectation) itulah yang membentuk suatu peranan. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup>

Negara Jepang dalam pengertian diatas menduduki posisi sebagai Negara kaya, makmur dan super dikawasan Asia yang mempunyai hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia, sehingga hal itu memicu sebuah harapan bagi Kabupaten Sleman agar Jepang membantu dalam pengembangan potensi daerah di Kabupaten Sleman. Keputusan untuk membantu pengembangan potensi daerah di Kabupaten Sleman di buat ketika Jepang sedang menjalankan peranan atau serangkaian peranan yaitu sebagai Negara kaya dan dermawan yang menghendaki agar potensi di Kabupaten Sleman dapat terangkat di dunia internasional.

Menurut John Wahlke, teori peranan mempunyai dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik.<sup>5</sup> *Pertama*, ia menunjukkan bahwa aktor politik

---

<sup>4</sup> SP. Varna, Teori Politik Modern, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

<sup>5</sup> Ibid, Mukhtar Mas'oed, hal. 45



sosial yang kompleks. *Kedua*, Peranan yang terlihat nyata sesungguhnya tersiri dari berbagai sub-peranan.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Negara Jepang sangat berperan bagi pengembangan potensi daerah di Kabupaten Sleman. Bahkan dapat dikatakan bahwa pemerintah Jepang berperan sangat penting sebagai alat atau proses tercapainya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sleman. Sebagai alat disini dimaksudkan bahwa peranan Negara asing dalam hal ini Jepang mempunyai kekuatan yang sangat mendukung bagi pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengembangkan potensi daerah. Negara Jepang dalam hal ini merupakan negara yang bersifat multifungsi sebab menjalankan fungsi yang bersifat umum.

Negara sebagai *agency* (alat) yang mempunyai kekuasaan atau mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.<sup>7</sup> Manusia hidup dalam kerjasama, sekaligus hidup dalam suasana yang penuh antagonis dan pertentangan. Negara adalah unit dasar dari masyarakat internasional, sedangkan unit dasar dari negara adalah individu-individu sebagai warga dari suatu negara.

Negara sebagai aktor internasional berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi secara internasional dalam hal yang berbeda-beda, dengan demikian adanya peranan Negara dapat memberikan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu di lingkungan internasional. Dapat dikatakan peran Negara Jepang sebagai

Aktor internasional dalam membantu pengembangan potensi di Kabupaten Sleman merupakan reaksi dari situasi internasional yang muncul.

Rumus ini didasarkan pada asumsi bahwa peran Pemerintah Jepang dalam pengembangan potensi daerah di Kabupaten Sleman menggambarkan adanya interaksi sosial antara Pemerintah Jepang dengan Kabupaten Sleman. Dimana Jepang mempunyai peran penting dalam pengembangan potensi daerah agar menjadi peluang investasi asing yang menjanjikan.

#### **F. Hipotesa**

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik hipotesa bahwa, peran pemerintah Jepang dalam pengembangan potensi daerah di Kabupaten Sleman adalah membantu dalam bentuk pemberian hibah, bantuan dalam merehabilitasi Candi Garuda, serta kerjasama dalam bidang Penelitian dan Pengembangan Tanaman Kehutanan.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini di mulai sejak tahun 2004 – 2006, dimana pada tahun 2004 pemerintah Jepang mulai mendatangkan para pengusaha pengusaha dari Jepang untuk bersedia menanamkan modalnya di Kabupaten Sleman.

## **H. Metode Penelitian**

Penulisan ini bersifat studi kepustakaan (*library serearch*). Untuk itu penulis mengambil referensi berupa : Buku – buku literatur, bulletin, jurnal, surat kabar, majalah, *Web-Site* di internet dan juga reverensi-referansi lain yang relevan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan ini termuat dalam empat bab, dimana masing masing bab akan berisi tentang hal hal sebagai berikut :

**BAB I :** Merupakan pendahuluan yang berisi tentang alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka dasar pemikiran, jangkauan penelitian, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Berisi tentang peran Jepang (ODA) di kawasan Asia Tenggara, baik itu kerjasama dengan negara – negara di Asia Tenggara maupun kerjasama dengan Organisasi di Asia Tenggara.

**BAB III :** Berisi tentang profil Kabupaten Sleman, serta potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Sleman, Peluang dan hambatan yang dimiliki oleh para investor di Kabupaten Sleman. Serta dalam Bab III ini juga terdapat wujud atau aksi strategi investasi dan Undang Undang Otonomi Daerah yang mengatur Hubungan Pemerintah Daerah dengan Luar Negeri.